

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

The Influence Of Local Taxes, Regional Retributions, BUMD Profit And Capital Expenditure On Economic Growth In Aceh

Putri Utami^{a,1}, Emi Masyitah^{b,2}

^{a,b}Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

ptrutami9520@gmail.com¹, Emi.masyitah@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal Provinsi Aceh periode 2011-2020. Sedangkan sampel data dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 data observasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, sedangkan retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh periode 2011-2020.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of testing and analyzing the effect of Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits and Capital Expenditures on Economic Growth in Aceh. The population used in this study is data on economic growth, local taxes, regional levies, BUMD profits and capital expenditures of Aceh Province for the 2011-2020 period. While the sample data in this study were as many as 50 observational data. This research uses quantitative research with associative approach. The data collection technique used in this research is to use the literature study method and the documentation method. While the analysis technique used is multiple linear regression analysis, hypothesis testing and coefficient of determination. The results of this study indicate that local taxes have a significant effect on economic growth in Aceh, while regional levies, BUMD profits and capital expenditures have no significant effect on economic growth in Aceh, and simultaneously regional taxes, regional levies, BUMD profits and capital expenditures together. significant effect on economic growth in Aceh for the 2011-2020 period.

Keywords : Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, Capital Expenditures and Economic Growth

Info Artikel :

Disubmit: 14 Juni 2022

Direview: 16 Juli 2022

Diterima : 18 Agustus 2022

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu Provinsi di Pulau Sumatera Indonesia yang diberikan otonomi khusus. Aceh adalah Provinsi dengan rekor yang cukup bagus dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh bisa diprosikan ke dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), di mana PDRB adalah nilai tambah barang dan jasa biasanya dihasilkan dalam waktu satu tahun (Mononimbar,

Walewangko dan Sumual,2017). Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Hasan dalam Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan kegiatan pada sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian, baik itu sektor pendapatan suatu daerah maupun pengeluaran daerah.

Tabel 1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh ADHK Selama Tahun (2011-2020)

Tahun	PDRB ADHK	Δ
2011	108.217.625,20	-
2012	114.552.081,60	5,85 %
2013	121.972.993,20	6,47 %
2014	130.448.241,80	6,94 %
2015	129.092.659,01	-1,03 %
2016	136.843.817,97	6,00 %
2017	145.806.922,50	6,54 %
2018	155.910.977,03	6,92 %
2019	164.167.638,19	5,29 %
2020	166.377.300,74	1,34 %

Sumber : BPS Aceh, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi PDRB Provinsi Aceh selama tahun 2011-2020 mengalami naik turun. Pada tahun 2011-2014 PDRB Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Namun di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -1,03%. Pada tahun 2016 PDRB mengalami peningkatan sebesar 6,00% hal ini dikarenakan pemerintah mengoptimalkan sektor non migas. Pada tahun 2017 PDRB juga mengalami peningkatan sebesar 6,54% hal ini disebabkan karena produksi migas dan pertambangan mulai membaik kembali. Kemudian di tahun 2018 Produk Domestik Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 6,92 %. Hal ini disebabkan penduduk di Aceh meningkat, dengan banyaknya penduduk maka semakin banyak kegiatan produksi barang dan jasa dalam ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019-2020 Produk Domestik Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 164,16 juta dan 166,37 juta yang disebabkan meningkatnya harga komoditas barang produk.

Tabel 2
Perkembangan Pajak Daerah, Provinsi Aceh Periode Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Pajak Daerah	Δ
2011	586.181.445.846	-
2012	687.476.816.747	17,28 %
2013	752.846.745.436	9,50 %
2014	1.030.679.175.160	36,90 %
2015	1.172.685.149.787	13,77 %
2016	1.252.745.084.804	6,82 %
2017	1.315.393.895.060	5,00 %
2018	1.309.081.813.533	-0,47 %
2019	1.409.251.915.061	7,65 %
2020	1.477.991.066.969	4,87 %

Sumber: DJP dan Kemenkeu Indonesia diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2011 – 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 Pajak Daerah Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 6,82% dan 5,00% dikarenakan pada saat itu Pemerintah Provinsi Aceh memberikan pemutihan pajak atas kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya diwajibkan membayar pajak pada tahun berjalan. Kemudian pada tahun 2018 Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar -0,47%, hal ini terjadi karena menurunnya tarif pajak bahan bakar yang berlaku. Belakangan ini semakin banyak orang yang membeli kendaraan bermotor maka semakin banyak juga yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan karena pajaknya mahal. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 pajak daerah Povinsi Aceh kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,65% dan 4,87%. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan kedua setelah pajak daerah sebagai sumber pendapatan penyumbang PAD, apalagi untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah.

Tabel 3
Perkembangan Retribusi Daerah, Provinsi Aceh Periode
Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Retribusi Daerah	Δ
2011	9.416.021.790	-
2012	6.317.974.149	-32,90 %
2013	6.346.061.307	0,44 %
2014	3.701.216.511	-41,67 %
2015	4.799.510.950	29,67 %
2016	9.504.916.328	98,03 %
2017	8.050.858.918	-15,29 %
2018	20.762.789.454	157,89 %
2019	17.087.692.809	-17,70 %
2020	8.159.969	-99,95 %

Sumber: DJP dan Kemenkeu Indonesia diolah

Tabel 3 menunjukkan penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2011 – 2020. Dimana Retribusi Derah Provinsi Aceh mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 157,89%. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh yang membuka usaha sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi di tahun 2019 dan tahun 2020 Retribusi Daerah Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar -17,70% dan -99,95% yang disebabkan banyaknya jasa retribusi yang tidak dilaksanakan semestinya seperti parkir ilegal, pasar gelap dan sebagainya yang menyangkut retribusi itu sendiri.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan daerah yang didirikan dengan menggunakan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah.

Tabel 4
Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba/Rugi BUMD Provinsi Aceh Periode Tahun 2011 s/d 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Usaha	Pendapatan Lainnya	Laba Sebelum Pajak	Pajak Usaha	Laba Bersih
2011	1.445.211	1.163.136	61.343	343.418	91.480	251.938
2012	1.625.147	1.236.440	70.713	459.419	122.527	336.892
2013	1.715.462	1.281.642	45.871	479.691	132.777	346.914
2014	1.968.036	1.521.054	51.967	498.949	134.419	364.530
2015	2.292.512	1.796.136	41.851	538.227	132.224	406.003
2016	1.178.417	1.098.094	52.943	133.266	2.583	130.684

2017	2.432.898	1.949.379	49.637	533.151	99.413	433.145
2018	2.766.345	2.233.068	11.207	544.485	101.340	443.738
2019	2.618.883	2.085.509	3.198	536.572	93.863	442.708
2020	2.531.016	2.129.035	3.585	405.566	87.338	318.232

Sumber: Survei BUMD diolah

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan BUMD di Provinsi Aceh pada tahun 2011 adalah 1,44 triliun rupiah. Pendapatan ini meningkat menjadi 2,53 triliun rupiah pada tahun 2020. Hasil pendapatan 2020 sekaligus melanjutkan tren negatif. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan BUMD di Aceh dalam kurun tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Seiring dengan penurunan pendapatan, biaya usaha BUMD juga mengalami kecenderungan menurun. Meskipun jika dibandingkan antara biaya usaha tahun 2020 terhadap 2019, jumlah biaya usaha mengalami kenaikan. Namun biaya usaha tahun 2020 lebih rendah dibandingkan 2018, bahkan selisihnya mencapai 104 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan usaha BUMD Aceh yang diikuti peningkatan biaya usaha membuat laba kotor BUMD tidak meningkat signifikan dalam kurun 10 tahun terakhir.

Tabel 5
Perkembangan Belanja Modal Provinsi Aceh Periode Tahun 2011 s/d 2020

Tahun	Belanja Modal	Δ
2011	1.473.983.448.179	-
2012	815.338.776.452	-44,68 %
2013	1.650.120.551.283	102,38 %
2014	2.407.479.412.537	45,89 %
2015	2.025.103.488.978	-15,88 %
2016	2.284.852.301.265	12,82 %
2017	2.168.299.049.592	-5,10 %
2018	2.503.941.129.737	15,47 %
2019	3.162.088.165.983	26,28 %
2020	1.755.472.079.286	-44,48 %

Sumber: DJP dan Kemenkeu Indonesia diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa belanja modal di Provinsi Aceh Periode tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 belanja modal Provinsi Aceh adalah sebesar 1,47 triliun rupiah. Namun di tahun 2012 belanja modal di Provinsi Aceh menurun sebesar -44,68%. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 belanja modal di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 102,38% dan 45,89%. Namun pada tahun 2015 belanja modal di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar -15,88%. Pada tahun 2016 belanja modal di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 12,82%, namun pada tahun 2017 belanja modal di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar -5,10%. Belanja modal di Provinsi Aceh pada tahun 2018 adalah 2,50 triliun dan meningkat di 2019 sebesar 26,28%. Namun di tahun 2020 belanja modal di Provinsi Aceh kembali menurun sebesar -44,48%, hal ini terjadi karena drastisnya penurunan pertumbuhan belanja modal Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota akibat pembangunan fisik yang biasanya memacu pada akhir tahun tidak dapat sepenuhnya dilakukan pada tahun 2020 karena terkendala pandemi Covid-19.

Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2022) bahwa saat ini telah berkembang isu kalau Provinsi Aceh merupakan Provinsi termiskin di Sumatera. Fenomena ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang sangat kritis terutama yang berkaitan dengan manajemen kebijakan fiskal (pendapatan dan pengeluaran). Seharusnya Provinsi Aceh yang sebagai salah satu Provinsi yang memiliki limpahan anggaran karena adanya transfer dana Otonomi khusus dari sejak tahun 2008 ini menjadi penggerak bagi Provinsi Aceh dalam melaksanakan pembangunan ekonomi pasca damai dan bencana Tsunami. Namun yang terjadi malah sebaliknya, limpahan anggaran berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian

Aceh. Masalah ini tidak terlepas dari kemampuan pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah Aceh yang masih belum maksimal dalam menyukseskan agenda pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah ukuran perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan produk barang dan jasa dalam suatu masyarakat dan peningkatan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan Ekonomi juga merupakan upaya untuk peningkatan produksi guna mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adiasmita & Rahardjo, 2013).

Ciri – Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Berikut enam ciri-ciri yang ada dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

- Adanya laju pertumbuhan penduduk, diikuti dengan produk per kapita yang cepat.
- Terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat.
- Adanya perubahan struktural yang tinggi.
- Muncul urbanisasi dalam suatu Negara
- Adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju.
- Muncul kondisi arus barang, modal serta manusia antar berbagai bangsa di dunia.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

a) Sumber Daya Alam (SDA)

Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi.

c) Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan.

d) Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian.

e) Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi.

f) Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara

Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah (Madiasmo, 2018).

Menurut Kaho (2016:80) ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat di ikhtisarkan seperti berikut

- a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pembangunan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Siahaan & Pahala, 2016).

Ciri – Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:129) beberapa ciri melekat padaretribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintahan atas pembayaran yang dilakukannya.
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Jenis – Jenis Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Laba BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan daerah yang didirikan dengan menggunakan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuan dari didirikannya BUMD adalah untuk mencapai lapangan kerja atau mendorong pembanguana ekonomi Daerah.

Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

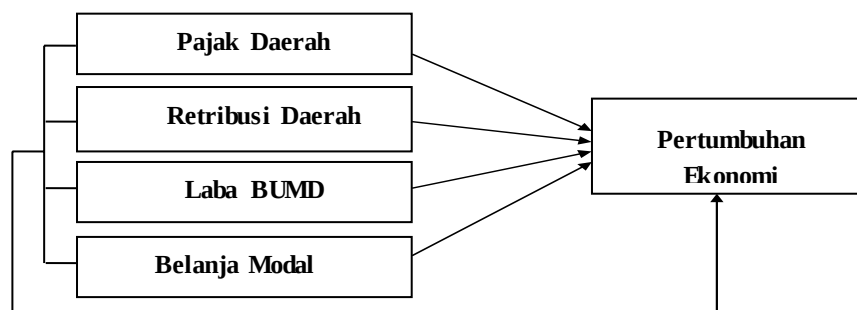
Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- 3) Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
- 4) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha

Belanja Modal

Menurut (Halim & Abdul, 2014) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sama dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang Nomor 71 tahun 2010 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Skema Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah 2022

3. METODE

Jenis dan Sumber Data

<http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index> | redaksijurnalupu@gmail.com

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sujarweni & Wiratna, 2015). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang didapatkan dengan cara mengumpulkan atau mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian yang disusun. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan dari yang di dapat dari Dirjen Pajak & Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh tahun 2011-2020. Pengumpulan data di peroleh dari penelitian terdahulu, buku, dan situs terpercaya yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Menurut Audiah Umairah (2019:67) analisis data kuantitatif merupakan bentuk analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka numerik tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Deskriptif

Tabel 6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Pajak Daerah	10	5,86	1,48	1,09	3,19155
Retribusi Daerah	10	8159969,00	2,08	,50	,67554
Laba BUMD	10	130684,00	443738,00	,40	,63882
Belanja Modal	10	8,15	3,16	2,02	6,44358
Pertumbuhan Ekonomi	10	,20	,74	,7240	,82483
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa variabel independen Pajak Daerah memiliki nilai minimum 5,86. Pajak Daerah memiliki nilai maximum dengan nilai sebesar 1,48 dan untuk nilai rata-rata (Mean) Pajak Daerah Sebesar 1,09 dan standar deviasinya sebesar 3,19155. Pada variable Retribusi Daerah terlihat nilai minimum sebesar 8159969,00. Nilai maximum Retribusi Daerah sebesar 2,08 dan untuk nilai rata-rata (Mean) dengan nilai sebesar 0,50 dengan standar deviasinya sebesar 0,67554. Selanjutnya pada variable Laba BUMD terlihat bahwa nilai minimum sebesar 130684,00. Nilai maximum Laba BUMD sebesar 443738,00 dan untuk nilai rata-rata (Mean) dari Laba BUMD yaitu sebesar 0,40 dengan standar deviasinya adalah sebesar 0,63882. Pada variable Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 8,15. Nilai maximum Belanja Modal sebesar 3,16 dan untuk nilai rata-rata (Mean) dengan nilai sebesar 2,02 dengan standar deviasinya sebesar 6,44368. Selanjutnya pada Pertumbuhan Ekonomi terlihat nilai minimum sebesar 0,20. Nilai maximum Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,74 dan untuk nilai rata-rata (Mean) dengan nilai sebesar 0,7240 dengan standar deviasinya sebesar 0,82483.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,553	0,160		5,169	,004

Pajak Daerah	6,089	,000	,959	4,525	,006
Retribusi Daerah	,000	,001	,141	,784	,468
Laba BUMD	20,312	31,545	,098	,644	,548
Belanja Modal	-3,444	,000	-,109	-,447	,673

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 22 diatas akan didapat persamaan regresi berganda model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,553 + 6,089(X_1) + 0,000(X_2) + 20,312(X_3) - 3,444(X_4) e$$

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas (One Sample Kolmogrov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		6386499,66279950
Most Extreme Differences	Absolute		,162
	Positive		,089
	Negative		-,162
Test Statistic			,162
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari pengolahan data tersebut bahwa data dapat terdistribusi dengan normal karena data dari masing-masing variabel memiliki probabilitas lebih besar dari 0.05 (5%). Data penelitian dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai dari setiap variabel > 0,05. Dapat dilihat dari kolom Asymp.sig atau nilai signifikan sebesar 0,200 (20,0%) yang menyatakan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel diatas terdistribusi normal.

1) Uji Multikolinieritas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,553	0,160		5,169	,004		
Pajak Daerah	6,089	,000	,959	4,525	,006	,442	2,261
Retribusi Daerah	,000	,001	,141	,784	,468	,617	1,620
Laba BUMD	20,312	31,545	,098	,644	,548	,853	1,172
Belanja Modal	-3,444	,000	-,109	-,447	,673	,331	3,019

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Uji Multikolinieritas menunjukkan nilai VIF pada setiap variabel, nilai VIF pada variabel Pajak Daerah sebesar 2,261 < 10, dan nilai *tolerance* Pajak

Daerah $0,442 > 0,1$. Retribusi Daerah sebesar $1,620 < 10$, dan nilai *tolerance* Retribusi Daerah yaitu $0,617 > 0,1$. Laba BUMD sebesar $1,172 < 10$ dan nilai *tolerance* Laba BUMD $0,853 > 0,1$. Belanja Modal sebesar $3,019 < 10$ dan nilai *tolerance* Belanja Modal sebesar $0,331 > 0,1$. Dapat diketahui berdasarkan nilai VIF setiap variabel lebih kecil dari 10, dan berdasarkan nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas

- 2) Uji Heterokedastisitas
- 3)

Tabel 10 Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-856283,176	5985869,548		-,143	,892
Pajak Daerah	6,713	,000	,531	1,070	,334
Retribusi Daerah	,000	,000	-,522	-1,243	,269
Laba BUMD	3,081	14,710	,075	,209	,842
Belanja Modal	1,356	,000	,002	,004	,997

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Uji Glejser digunakan untuk memperhatikan nilai probabilitas signifikansi pada tabel sig. Tingkatan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika masing-masing variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

1. Uji Hipotesis
 - 1) Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,553	0,160		5,169	,004		
Pajak Daerah	6,089	,000	,959	4,525	,006	,442	2,261
Retribusi Daerah	,000	,001	,141	,784	,468	,617	1,620
Laba BUMD	20,312	31,545	,098	,644	,548	,853	1,172
Belanja Modal	-3,444	,000	-,109	-,447	,673	,331	3,019

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan taraf signifikasi 0,05 dapat di peroleh hasil t table sebesar 1,679 tabel 4.6 diatas diperoleh hasil uji t dengan menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak Daerah (X1) memiliki t hitung $4,525 > 1,679$ dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,006 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- 2) Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki t hitung $0,784 < 1,679$ dan nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu $0,468 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 3) Variabel Laba BUMD (X3) memiliki t hitung $0,644 < 1,679$ dan nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu $0,548 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 4) Variabel Belanja Modal (X4) memiliki t hitung $-0,447 < 1,679$ dan nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu $0,673 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_4 di tolak. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2) Uji Simultan (Uji F)

Tabel 12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	33316785566974 40,000	4	832919639174360,20 0	11,345
	Residual	36708640148644 3,940	5	73417280297288,780	
	Total	36987649581838 84,000	9		

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Laba BUMD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa F hitung 11,345 lebih besar dari F tabel yaitu 3,20 dan dengan nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,10 $> \alpha$ 0,05 yang berarti H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,901	,821	8568388,431	,986

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Laba BUMD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22

5) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh periode 2011-2020 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
3. Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
4. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

REFERENSI

- Aceh, B. P. (2020). *Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD Provinsi Aceh 2020)*.11542.2011.<https://aceh.bps.go.id/publication/2022/01/06/08796560368c6444131ff822/profil-badan-usaha-milik-daerah--bumd--provinsi-aceh-2020.html>
- ACEH, H. (2022). *No Title*. AJNN.net. <https://humas.acehprov.go.id/gubernur-nova-parpol-ikut-berperan-dalam-trend-positif-pertumbuhan-ekonomi-aceh/>
- Adiasmita, & Rahardjo. (2013). *Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al-Butary, B., Murtani, A., Soemitra, A., & Muda, I. (2021). HOW THE EFFECT OF ONLINE TRANSPORTATION ON COMMUNITY WELFARE THROUGH UNEMPLOYMENT VARIABLES COVID 19 IN MEDAN CITY. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(6).
- Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
<https://aceh.bps.go.id/.djpk.kemenkeu.go.id.>
- Dr. Muammil Sun'an, S.E., M.P., M. A. (2015). *Ekonomi Pembangunan* (1st ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ghozali, & Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, & Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, I. K., & Kasmin, M. A. (2021). *Electronic Marketing Model for Higher Education*.
- Hartono, H., Sadikin, M., Sari, D. M., Anzelina, N., Lestari, S., & Dari, W. (2020). Implementation of Artificial Neural Networks with Multilayer Perceptron for Analysis of Acceptance of Permanent Lecturers. *Jurnal Mantik*, 4(2), 1389-1396.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate. *Jurnal EMBA*, 9(3), 141–150.

Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.

Juwari, Setyadi, D., & Ulfah, Y. (2016). *Pengaruh Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1). Balikpapan: Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

Kurniawan, R. (2014). *Peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

Madiasmu. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. (2015). *Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Miko, J., & Yudrieka, T. (2020). *Sosiodemografi Memoderasi Pemahaman Masyarakat Dengan Mendeterminasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan)*. Muhammadiyah University North Sumatra.

Mina, M., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39–51.

Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.

Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.

Siahaan, & Pahala, M. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.CV.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.CV.

Sujarweni, & Wiratna, V. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi*, 43, 13–22.